



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE ON GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE

Bintang Maharani¹, Ayu Puspitasari², Nella Yantiana³

Universitas Tanjungpura

*Email: bintangmaharani971@gmail.com

ABSTRAK

Terdapat naik turunnya pendapatan daerah yang dialami oleh Kalimantan Barat. Fokus penelitian ini menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Barat. Pendapatan menjadi indikator kemampuan keuangan daerah dan belanja modal sebagai efektivitas belanja modal dari alokasi dana untuk infrastruktur. Melalui metode regresi linier berganda, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah, memberikan wawasan untuk kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Data sekunder dari LRA BKAD provinsi Kalimantan Barat. Populasi Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan sampel ialah teknik purposive sampling dan sampel 69. Teknik analisis uji statistik deskriptif, asumsi klasik, ketepatan model dan analisis regresi linear berganda memakai SPSS 26. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah secara positif kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah tidak dipengaruhi Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan

ABSTRACT

There is an increase and decrease in regional income experienced by West Kalimantan. The focus of this research is to analyze the impact of Regional Original Income and Capital Expenditure on the financial performance of the West Kalimantan regional government. Income serves as an indicator of regional financial capability, while capital expenditure measures the effectiveness of capital expenditure from fund allocation for infrastructure. Through multiple linear regression method, this research will reveal the extent to which these two factors affect the government's financial performance, providing insights for fiscal policy and regional financial management. The independent variables are Regional Original Income and Capital Expenditure. Secondary data is obtained from the Regional Financial Statements of the West Kalimantan Provincial Government. The population is the West Kalimantan Province. Sample selection is conducted using purposive sampling technique with a sample size of 69. The analysis techniques include descriptive statistical tests, classical assumptions, model accuracy, and multiple linear regression analysis using SPSS 26. The research findings indicate that there is a positive influence on the government's financial performance by Regional Original Income. Government's financial performance is not affected by Capital Expenditure.

Keywords: Local Revenue, Capital Expenditure, and Financial Performance

PENDAHULUAN

Mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah pemberian otonomi yang luas kepada regional untuk menyebarkan segala kebutuhan yang lebih cepat kepada pemerintahan daerah setempat agar pembangunan daerah teratasi. UU No. 33

Tahun 2004 Pasal 10 menyampaikan bahwasanya sumber dana untuk membangun daerah didapat dari pemerintah pusat. Dengan ini pemerintahan daerah bisa mendanai kegiatan dengan PAD.

Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah dana perolehan daerah



yang dipungut/ditempati peraturan daerah yang berlaku. Semua organisasi, termasuk organisasi sektor publik, harus melakukan penilaian kinerja untuk menentukan seberapa bertanggung jawab sebuah organisasi untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan lebih baik meningkatkan kinerja pemerintah, membantu pengalokasian sarana dan pengambilan ketentuan meningkatkan kualitas layanan publik (Ulum, 2012).

Untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah APBD seperti rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efektivitas, rasio efisiensi realisasi penerimaan keuangan, rasio kemandirian, rasio belanja modal, dan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman. mengetahui apakah pertumbuhan pendapatan daerah dalam periode 2018–2022 positif atau negatif. Karena mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memperbaiki kemampuan mereka mencegah penurunan atau pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya (Darmayanti, 2019).

Menurut Yulianah (2017), mengatakan bahwa untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien otonomi daerah, otonomi kabupaten/kota diutamakan karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalimantan Barat dikelilingi oleh dua kota dan dua belas kabupaten. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mengapa PAD Kalimantan Barat tidak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Selain itu, peneliti juga ingin melihat seberapa efektif kinerja keuangan pemerintahan di provinsi tersebut.

Data BPS Kalimantan Barat periode 2018-2022 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kalimantan Barat meningkat. Pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar 6.332.879.812 dalam ribuan rupiah, naik 0,1%

pada tahun 2021 sebesar 6.431.288.413 dalam ribuan rupiah, dan turun 1,06% pada tahun 2022 sebesar 6.103.624.353 dalam ribuan rupiah. Untuk menunjukkan pertumbuhan yang efektif yang pada kinerja pemerintah dengan PAD dan belanja modal. Kunci untuk memperlihatkan seberapa berkualitasnya kinerja keuangan pemerintah daerah mengelola keuangan mendapatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peneliti sebelumnya Tahir, Mas'ud, dan Plyriadi (2019) Penelitian tersebut mendapati korelasi Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal memiliki dampak positif tidak signifikan. Dalam penelitian saya memiliki dua variabel bebas dari penelitian sebelumnya melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

PAD menurut Pasal 3 Huruf (a) UU No. 25 tahun 1999 mengatakan pendapatan didapatkan dari sumber-sumber pada wilayah sendiri. Halim (2004) menyatakan bahwa karena sektor pendapatan daerah menunjukkan seberapa banyak suatu daerah dapat mendanai operasi pemerintah dan pembangunan daerah, itu menjadikannya penting. PAD sangat penting untuk menentukan bagaimana pemerintah daerah dapat memperbaiki infrastruktur dan pelayanan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena itu untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus utama.



Belanja Modal

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2, belanja modal ialah biaya membeli aset tetap yang berguna untuk satu periode. Belanja modal merupakan biaya langsung untuk mendanai aset. Artinya belanja modal ialah anggaran dikeluarkan untuk membeli aset untuk pemerintah.

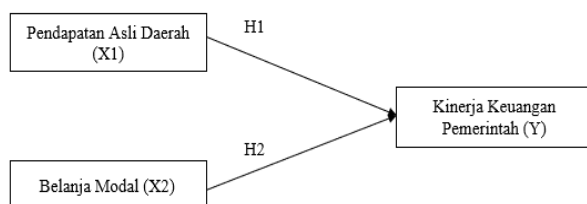
Kinerja Keuangan Pemerintah

Sedarmayanti (2007) menyatakan kinerja ialah hasil kerja seorang karyawan, proses manajemen, atau organisasi secara keseluruhan, yang dapat diukur dan ditunjukkan dengan jelas. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan kinerja keuangan ialah pandangan kemampuan organisasi atau instansi untuk mengelola sumber daya dari pengambilan hingga penyaluran.

Kerangka Konseptual

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah merupakan variabel bebas pada penelitian serta variabel bebas nya ialah PAD dan Belanja Modal. Hubungan ditunjukkan berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah cadangan yang diperoleh dari berbagai pengeluaran dan pengumpulan wilayah,

pengelolaan sumber daya yang terisolasi, serta jenis pendapatan asli lainnya. Aset ini merupakan perluasan total aset yang kemudian dijadikan modal bagi DPRD untuk membantu berbagai proyek yang bermanfaat bagi daerah setempat.

Penelitian yang dipimpin oleh Sukma dan Panji (2018) mengidikasikan adanya korelasi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kinerja Pemerintah Daerah provinsi. Penemuan serupa juga dikemukakan oleh Novi Natalia Padang dan Padang Wendi Suprpto (2023), yang beranggapan bahwa PAD berkontribusi besar terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. ini memperlihatkan ekspansi PAD biasanya diikuti oleh peningkatan kinerja pemerintah lokal. Meskipun demikian, hasil yang berbeda terlihat seperti pada penelitian (Azhar & Si, 2021) berdasarkan penelitian ini, PAD tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rumusan hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

H1: *Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.*

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Konsumsi cenderung melebihi satu periode moneter disebut belanja modal. Ini meningkatkan sumber daya dan mendorong peningkatan alokasi adat untuk operasional dan pemeliharaan. Dalam penelitian mereka Tahir, Mas'ud, dan Plyriadi (2019) mencatat Belanja Modal berdampak positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian mereka, (Maulina et al., 2021) dan memperoleh



belanja modal memiliki efek positif tetapi tidak signifikan.

Rumusan hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

H2: *Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.*

METODE

Pendekatan Penelitian

PAD dan Belanja Modal adalah variabel bebas yang akan diuji dengan kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel dependen. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi selama penelitian dan menentukan alasan di balik gejala tertentu (Abdullah, 2015). Penelitian diwilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kantor BKAD Prov. Kalbar. Penelitian dimulai 19 April dan berlangsung hingga selesai.

Gambar 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	Belanja Daerah / Total Pendapatan Daerah X 100%	Rasio
Belanja Modal (X2)	Rasio Efektivitas Belanja Modal	Belanja Modal / Total Belanja X 100%	Rasio
Kinerja Keuangan (Y)	Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan	Pendapatan Asli Daerah / Anggaran Pendapatan X 100%	Rasio

Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel bebas dan terikat. SPSS 26 digunakan mengelola data dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, ketepatan model, dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Koefisien determinasi (R²), uji signifikansi simultan (f), dan uji signifikansi parameter individual (t) dapat digunakan untuk mengevaluasi ketepatan model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Dapat melihat data pada tabel di bawah:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	69	2.43	191.59	13.2167	25.18425
X2	69	7.32	80.50	22.2600	10.44590
Y	69	17.01	130.95	93.1441	22.35329
Valid N (listwise)	69				

Sumber: SPSS 26, 2024

Dapat disimpulkan angka terendah (*minimum*) dari PAD (X1) ialah 2,43 dimiliki oleh kabupaten Bengkayang dan Nilai tertinggi (*maximum*) 191,59 dimiliki oleh kabupaten Ketapang. Nilai rata-rata 13.2167 dengan standar deviasi (Std. Deviation) 25,18425. Untuk Belanja Modal (X2) nilai terendah (*minimum*) 7.32 dimiliki oleh kabupaten sambas dan Nilai tertinggi (*maximum*) 80,50 dimiliki oleh kabupaten

Sanggau. Nilai rata-rata 22,2600 dengan standar deviasi (Std. Deviation) 10,44590. Untuk Kinerja Keuangan Pemerintah nilai terendah (*minimum*) adalah 17,01 dimiliki oleh kabupaten Melawi dan Nilai tertinggi (*maximum*) 130.95 dimiliki oleh kabupaten Ketapang. Nilai rata-rata 93,1441 dengan standar deviasi (Std. Deviation) 22,5329.



Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Hasil
Normalitas	Normal
Multikolinieritas	Tidak terdeteksi gejala multikolinieritas
Heterokedasitas	Model regresi penelitian layak
Autokorelasi	Tidak terdeteksi gejala autokorelasi

Sumber: SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel diatas dengan rincian dibawah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Normalitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,060 > 0,050$. Artinya data penelitian normal maka bisa dilanjutkan uji berikutnya.
2. Hasil Uji Multikolinieritas *tolerance* variabel bebas sebesar $0,988 > 0,10$, VIF variabel bebas yaitu $1,012 < 10,0$. Data dapat dikatakan tidak terdeteksi gejala multikolinieritas karena tidak ada temuan diantara variabel independen dalam penelitian.
3. Hasil Uji Heterokedasitas menunjukkan R Square (0,065). Oleh karena nilai Chi-square (4,623) $<$ chi-square tabel (89,391208), artinya model regresi penelitian layak.
4. Hasil Uji Autokorelasi menunjukan (*d*) (1,827), sementara pada tabel (*d*) dU (1,6697) dan dL (1,5507), sehingga nilai $4-dU$ sebesar 2,3303. Artinya, $dU < d < d - dU$ ($1,6697 < 1,827 < 2,3303$) maka dari itu membuktikan model penelitian tidak terdeteksi gejala autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji T

Model	T
(Constant)	13.334
PAD (X1)	2.008
BM (X2)	.443

Sumber: SPSS 26, 2024

Dari tabel 6 dilihat t-hitung PAD (X1) yaitu 2,008, t-tabel 1,667 maka disimpulkan t-hitung $>$ t-tabel, terdapat pengaruh antara PAD (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) dan t-hitung untuk BM (X2)

yaitu 0,443 dan t-tabel 1,667 maka t-hitung $<$ t-tabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara BM (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	F
Regression	44,469
Residual	
Total	

Sumber: SPSS 26, 2024



Dari F-hitung dinilai 2,228 dan F-tabel adalah 3,14 sehingga F-tabel > F-hitung maka dapat dikatakan tidak berpengaruh kepada

Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). Dilihat bahwa hasil sig 0,116 > 0,050 menyebabkan tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Adjusted R Square
1	.035

Sumber: SPSS 26, 2024

Koefisien determinasi sebesar 0,035 yang berarti 3,5% kinerja keuangan dipengaruhi oleh PAD (X1) dan Belanja

Modal (X2) sebesar 3,5% sedangkan 96,5% dijelaskan dalam variabel lain yang tidak diteliti dan tidak dijelaskan.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B
1 (Constant)	2.833
X1	.110
X2	.043

Sumber: SPSS 26, 2024

Output tabel 6 diatas mendapati persamaan regresi, $Y_i = 2,883 + 0,110 X_1 + 0,043 X_2$. Konstanta sebesar 2.833 artinya PAD bernilai positif sebesar 0,110 dan Belanja Modal bernilai positif sebesar 0,043. Hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nilai Sig. PAD 0,049 < 0,050 dan nilai t-hitung 2,008 > t-tabel 1,667, disimpulkan memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah. Ini relevan dengan jurnal Sukma & Panji (2018) menyebutkan dalam penelitiannya PAD mempunyai hubungan positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

PAD melihat kemampuan dalam mengelola sumber daya lokal secara maksimal. Ketika PAD meningkat, artinya lebih banyak dana untuk dialokasikan ke berbagai program pembangunan dan

pelayanan publik, yang pada hakikatnya mampu meningkatkan kualitas hidup.

Namun, PAD tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai basis ekonomi dan fiskal yang baik, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini juga memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dan kurang tergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik-praktik keuangan yang transparan, akuntabel, dan akan berkontribusi baik pada kinerja keuangan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nilai Sig. belanja modal 0,659 > 0,050 dan nilai t-hitung 0,443 > t-tabel 1,667 bisa disimpulkan pengujian diatas mendapati tidak ada pengaruh dari belanja modal atas kinerja



keuangan pemerintah. Temuan berbanding terbalik dengan jurnal yang ditulis Tahir, Mas'ud, dan Plyriadi (2019) menyebutkan dalam penelitiannya Kinerja keuangan Pemerintah Daerah mempunyai hubungan positif tidak signifikan atas belanja modal.

Belanja Modal tidak ada mempunyai hubungan atas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian mungkin beragam hal yang menyebabkan kejadian tersebut. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya ialah efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja modal yang tidak optimal. Jika belanja modal tidak diarahkan dengan tepat atau tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak akan tercermin dalam peningkatan kinerja keuangan. Misalnya, investasi dalam infrastruktur atau aset tetap yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan atau pengurangan biaya operasi dapat mengakibatkan ketidakefisienan.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa belanja modal dalam periode penelitian ini tidak memberikan hasil jangka pendek yang signifikan, melainkan manfaatnya diproyeksi terlihat dalam waktu lama. Ini bisa menyebabkan kinerja keuangan dalam jangka pendek tidak menunjukkan perbaikan yang berarti meskipun ada peningkatan belanja modal.

Dampak dari hasil negatif ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan belanja modalnya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran modal diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai tambah yang jelas dan dapat diukur terhadap kinerja keuangan. Mereka juga perlu meningkatkan proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan

bahwa belanja modal tersebut benar-benar mendukung tujuan keuangan dan pembangunan daerah. Selain itu, pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana belanja modal perlu ditingkatkan agar setiap investasi dapat memberikan hasil yang diharapkan.

SIMPULAN

Penelitian memperoleh temuan penting terkait korelasi kinerja keuangan daerah dengan PAD dan Belanja Modal. PAD memiliki korelasi positif yang relevan kepada kinerja keuangan daerah. Ini menunjukkan pertambahan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif, memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan dan penganggaran, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya, penelitian menunjukkan korelasi kinerja keuangan yang tidak relevan terhadap Belanja Modal. Ini bisa disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja modal yang belum optimal serta manfaat belanja modal yang mungkin baru terlihat dalam jangka panjang.

Pemda harus mengoptimalkan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta melaksanakan program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal untuk memperkuat basis ekonomi daerah. Saran untuk penelitian berikutnya bisa menambah variabel yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah seperti dana transfer pusat, dana perimbangan dan lain-lain. Mungkin juga melakukan penelitian dengan Rasio Kinerja pemerintahan diluar penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Abdullah. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andirfa, Mulia., Hasan Basri., M. Shabri A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5 (3): 30-38.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral Dissertation, Udayana University).
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60-80.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The Effect Of Regional Original Income And Balance Funding On Regional Government Financial Performance. *Journal Of Islamic Accounting And Finance Research*—Vol, 1(1), 10-21580.
- Azhar, I., & Si, M. (2021). Pengaruh Pendapaan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa 1 The Effect Of Regional Local Revenue On Financial Performance Of The Langsa City Government. *Jurnal Transformasi Administrasi*.
- Darwanis Dan Ryanda Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1 (2): 183-199.
- Dewi, N. W. N., Dan M. K. S. Budhi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 4 (11): 1391-1420
- Ginting, J. A. G., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 315-320.
- Lathifa, H., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2).
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Nany, M., Mujiyono, M., & Seseliya, S. (2022). Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota/Kabupaten Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 191-200.
- Nurvaliza, S., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 739-747.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota



- Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Purwasih. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah" Kabupaten/Kota Diy Tahun 2011—2016). Universitas Pgrri Yogyakarta
- Rusmita, Sari. 2019. "Effect Of Regional Government Characteristics Of Financial Performance". *International Research In Economics And Finance*. 3 (2): 29-35.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111-134.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). *Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Rafika Aditama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI J Lexy, Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2016. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, I., Mas'ud, M., & Plyriadi, A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota makassar. *ISSN2089-0982, Hal*, 61-70.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

